

“HUMAN CAPITAL” DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

*Jufrianto Sibarani*

*Universitas Subang*

*e-mail: [jufriantosibarani@unsub.ac.id](mailto:jufriantosibarani@unsub.ac.id)*

INFORMASI ARTIKEL

**Submitted** : 2025-3-31  
**Review** : 2025-3-31  
**Accepted** : 2025-3-31  
**Published** : 2025-3-31

KATA KUNCI

Output Pendidikan, Dunia Kerja, Pendidikan Dan Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja, Kesenjangan Kompetensi, Pembangunan Nasional.

A B S T R A K

“Efforts at improving an individual’s capability to work productively can be pursued through training. Training also serves to bridge the gap between education and employment opportunities.” Kutipan di atas memberikan inspirasi terhadap analisis tema tulisan ini, yaitu: “Output Pendidikan dan Dunia Kerja.” Berdasarkan pandangan yang luas, kutipan tersebut dapat dimaknai bahwa untuk meningkatkan kemampuan atau kecakapan individu agar menjadi pribadi yang produktif, pada hakikatnya harus dilakukan melalui upaya-upaya pendidikan dan pelatihan. Lebih jauh lagi, pendidikan dan pelatihan tersebut berfungsi menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dengan peluang kerja. Sesuai dengan pemahaman tersebut, analisis ini akan mengangkat isu-isu di sekitar kesenjangan (gap) antara output pendidikan berupa lulusan termasuk kecakapan-kecakapannya dan tuntutan dunia kerja. Dalam kaitan itu penting untuk dicermati bagaimana seharusnya penyelenggaraan pendidikan agar lebih kondusif terhadap tuntutan dunia kerja. Isu-isu produktivitas dalam kaitannya dengan output pendidikan di Indonesia sesungguhnya membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius. Dalam berbagai media massa dan juga dalam banyak literatur sering dikemukakan masalah-masalah dunia kerja. Dimensi lain juga perlu di cermati adalah terjadinya peningkatan tenaga kerja indonesia pada tahun 2000-an. Sekarang sudah menjadi kenyataan apa yang diprediksi: lebih dair 90 juta tenaga kerja produktif dari seluruh penduduk indonesia. Munculnya masalah pemasaran tenaga kerja berkaitan erat dengan kecenderungan meningkatnya jumlah penduduk. Kecenderungan yang sama terjadi juga hampir di seluruh belahan dunia (Asian Education and Training). Hal ini mengungkapkan kebutuhan kritis bahwa harus diciptakan sejumlah besar lapangan pekerjaan dan pendidikan hendaknya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. pembangunan nasional.

## **PENDAHULUAN**

Masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia kerja tersebut sebenarnya mengindikasikan secara implisit masalah-masalah kependidikan. Dengan kata lain, masalah dunia kerja memiliki kaitan yang sangat erat dengan pendidikan, sebab SDM atau tenaga kerja yang memasuki dunia kerja pada hakikatnya merupakan produk dari proses- proses sistem pendidikan. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang periode kemerdekaannya tidak jauh berbeda dengan Indonesia, misalnya Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Taiwan, Singapore dapat dikatakan bahwa Indonesia ketinggalan khususnya dalam pengelolaan output pendidikan dan dunia kerja.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut banyak yang perlu dibenahi dalam kedua sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Untuk itu, perlu dan harus dicermati berbagai karakteristik bangsa Indonesia yang diyakini sangat mempengaruhi berkembangnya isu-isu di sekitar dunia pendidikan dan lapangan kerja. Isu pentingnya ‘modal manusia’ (human capital) melalui pengembangan pendidikan perlu juga dicermati dalam kaitan dengan orientasi politik, political will pemerintah, penentuan kebijakan pendidikan, bahkan kebijakan yang terkait dengan anggaran pendidikan.

Sebagai suatu negara yang sedang membangun menuju pembaharuan dalam semua sektor kehidupan, memiliki populasi terbesar keempat di dunia dan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, serta penyebaran penduduk yang sangat tidak merata, Indonesia memperoleh manfaat yang relatif rendah dari tenaga kerjanya. Keadaan ini berimplikasi pada rendahnya produktivitas dan pendapatan tenaga kerja. Fenomena ini menggambarkan bahwa masalah-masalah dunia kerja, termasuk masalah-masalah ketenagakerjaan di Indonesia, pengembangan (SDM) yang terkait dengan peranan pendidikan, sungguh kompleks dan multidimensional.

## **KAJIAN TEORI**

Fungsi pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan SDM adalah upaya mempersiapkan individu-individu dalam mencapai kedewasaan yang memungkinkan mereka dapat berpikir secara logis dan rasional, dan dapat berfungsi sebagai makhluk ciptaan Tuhan, individu ekonomi, person sosial, dan sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab. Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pengembangan program-program pendidikan dan pelatihan hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan skills dan profesionalisme dalam seluruh sektor pembangunan. Mutu SDM sesungguhnya merepresentasikan aset utama dan menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional.

Kontribusi mutu SDM dalam pembangunan sudah terbukti di tiga negara berkembang yang telah berubah menjadi negara industri baru di Asia, yakni Taiwan, Singapore, dan Korea Selatan. Kemajuan yang dicapai ketiga negara ini bukan karena kekayaan sumber- sumber alam yang dimilikinya tetapi terutama karena kualitas sumber daya manusianya. Jika kualitas dan mobilisasi SDM termasuk tenaga kerja Indonesia yang demikian besar jumlahnya dapat ditingkatkan, maka semakin terbuka peluang bagi Indonesia untuk mencapai kemajuan- kemajuan seperti yang telah dicapai negara- negara lain. Dalam konteks ini pendidikan memiliki peranan yang esensial untuk menghasilkan output (lulusan) dan sekaligus sebagai SDM yang berkualitas dalam dunia kerja.

Salah satu tantangan pokok dalam penyesuaian output pendidikan dan tuntutan dunia kerja baik dalam masa kini maupun pada masa yang akan datang adalah bagaimana mempersiapkan SDM yang bermutu, yang tidak hanya memiliki kecakapan dan keterampilan tetapi juga memiliki kemampuan inovatif dan kreativitas yang tinggi serta mampu menganalisis dan mengantisipasi kebutuhan pada masa yang akan datang. Dalam bagian berikut ini diungkapkan teori-teori human capital dan biaya pendidikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Human capital dan pembiayaan pendidikan**

Pada umumnya telah diakui bahwa pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi SDM yang mungkin lebih penting dari investasi modal fisik. Hasil-hasil penelitian di sejumlah negara mengungkapkan bahwa pendidikan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Beberapa diantara dampak pendidikan bagi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah berkembangnya kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, keterampilan, keahlian, kemampuan, dan wawasan mereka agar mampu bekerja lebih produktif baik secara perorangan maupun kelompok. Pendidikan juga berfungsi dalam meningkatkan kecerdasan sosial, politik, dan budaya serta memacu penguasaan dan pendayagunaan teknologi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan pertimbangan seperti diuraikan di atas, sudah seharusnya setiap negara menempatkan pembangunan pendidikan sebagai kebijakan yang memiliki prioritas tertinggi. Hal ini terbukti di negara-negara maju termasuk negara-negara industri baru, dimana terlihat secara nyata kontribusi yang signifikan antara kebijakan pembangunan pendidikan dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai masyarakatnya.

Dalam kasus Indonesia, investasi SDM untuk pengembangan modal manusia (human capital) justru menunjukkan gejala yang memprihatinkan. Kecilnya anggaran pendidikan merupakan indikasi bahwa pendidikan lebih dianggap sebagai sektor layanan publik (public service) yang hanya dituding menghabiskan uang negara daripada investasi produktif. Dengan kata lain, pendidikan belum dianggap sebagai investasi produktif yang sangat menguntungkan masa depan bangsa. Keadaan ini bertolak belakang dengan kebijakan negara-negara industri baru paling tidak di kawasan Asia seperti Malaysia, Taiwan, Thailand dan Korea Selatan yang memberikan prioritas yang tinggi pada pendidikan dan mengeluarkan anggaran pendidikan yang cukup besar (Suryadi, 2001).

Sesuai dengan uraian-uraian di atas dapat ditegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi SDM yang produktif, dan dengan keberanian mengeluarkan anggaran yang besar untuk pengembangan pendidikan diharapkan akan diperoleh return yang bahkan jauh lebih besar di kemudian hari. Wawasan dan cara berpikir seperti inilah yang telah diterapkan umumnya negara maju dan negara-negara industri baru seperti yang dicontohkan di atas. Beberapa strategi untuk memperjuangkan komitmen terhadap anggaran pendidikan (Suryadi, 2002) adalah:

- (1) sosialisasi pemahaman bagi para pengambil keputusan, bahwa pengeluaran untuk pendidikan merupakan investasi SDM produktif dengan rate of return yang tinggi;
- (2) kajian alokasi anggaran pendidikan berdasarkan item-item pengeluaran untuk mencapai pendidikan bermutu yang direpresentasikan oleh output pendidikan khususnya dalam dunia kerja; dan (3) perataan dan keadilan dalam alokasi anggaran

pendidikan harus mampu mendorong perluasan dalam mutu dan efisiensi pendidikan.

## **2. Human Capital: The Profit Lever of a Knowledge Economy**

(Modal Manusia: Peningkatan Profit dari ‘Ekonomi Pengetahuan’)

Dalam pandangan ekonomi abad ke-19, hanya melalui investasi aset-aset modal yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pandangan ini, kemudian berubah khususnya pada tahun-tahun terakhir abad ke-20 dimana manajemen organisasi, termasuk organisasi sistem pendidikan, telah mengakui bahwa manusia bukan cash, bangunan atau peralatan/perlengkapan sebagai faktor-faktor pembeda yang esensial dalam perusahaan yang bergerak dalam organisasi bisnis atau yang bertujuan untuk pelayanan publik.

Seiring dengan perjalanan kehidupan manusia memasuki era milenium baru dan setiap warga masyarakat menemukan dirinya berada dalam suatu ekonomi pengetahuan (knowledge economy), maka tidak dapat lagi disangkal bahwa manusia faktor utama yang dapat meningkatkan profit (profit lever). Seluruh aset suatu organisasi atau badan usaha (perusahaan), selain aset berupa manusia, adalah tak berdaya. Aset-aset selain manusia tersebut, tidak lebih dari sumber- sumber pasif yang membutuhkan kreativitas manusia agar aset-aset tersebut menjadi bernilai. Kunci utama untuk menjalankan secara berkesinambungan suatu perusahaan yang dapat memberikan profit adalah produktivitas tenaga kerja tidak lain adalah ‘modal manusia’ (human capital) itu sendiri. Dalam perekonomian seperti di A.S., di mana lebih separuh GNP dialokasikan untuk investasi SDM, jelas bahwa manusia yang knowledgeable merupakan kekuatan yang menentukan keberhasilan dunia kerja.

Pandangan seperti diuraikan di atas memberikan implikasi penting bagi tanggung jawab manajemen pendidikan untuk mengkombinasikan pertimbangan faktor manusiawi dengan informasi yang senantiasa berubah. Tujuannya antara lain adalah yang berhubungan dengan pemikiran sebagai berikut: informasi yang didasarkan pada aktivitas pegawai adalah penting bagi partner dengan data finansial; jika data finansial dapat memberikan informasi tentang apa yang terjadi, sedangkan data modal manusia (human capital) dapat memberi informasi tentang mengapa terjadi seperti demikian; dan jika tujuan pengelolaan lebih diorientasikan untuk kinerja di masa depan daripada masa lampau, maka dibutuhkan leading indicators (indikator terpenting) dan lagging indicators (indikator yang menunjukkan kelambanan dalam kinerja). Ketiga hal ini, sebagaimana telah diketahui, tidak dapat ditemukan dalam profit tradisional dan juga dalam statement kerugian (loss statements). Kecenderungan ini menjadi tantangan yang harus direspon melalui manajemen pendidikan untuk mempersiapkan output sesuai tuntutan dunia kerja.

## **3. Analisis Biaya dan Manfaat dalam Pendidikan**

Pengeluaran untuk pendidikan telah melonjak beberapa dasawarsa yang lalu. Biaya pengeluaran pendidikan meningkat karena meningkatnya pengeluaran dalam sistem sekolah-sekolah lokal (Cohn, 1979). Namun, penting dicermati bahwa biaya sekolah tidak sama dengan pengeluaran pendidikan, karena pertama belanja pendidikan mencakup tidak hanya pengeluaran untuk kegiatan rutin (seperti pembayaran untuk layanan guru yang diberikan selama waktu tertentu) namun juga pengeluaran pembangunan dengan istilah “kapital/modal” seperti pengeluaran untuk bangunan dan perlengkapan, perbaikan dan renovasi bangunan yang tua, dll. Tidak dihitung sebagai pengeluaran biaya rutin, hingga sebagian atau seluruh pengeluaran tadi secara nyata digunakan dalam waktunya. Sementara penyusutan bangunan dan perlengkapan (karena

dipakai dan penyusutan karena usang) selama waktu sekarang dihitung sebagai biaya rutin. Selanjutnya pengeluaran kapital sekarang mempengaruhi perhitungan biaya rutin selama nilai aset fisik sekolah terus bertambah.

Pada waktu bersamaan biaya rutin pada prinsipnya mencakup pengeluaran langsung dan biaya kesempatan (biaya implisit) sebagai contoh biaya langsung dari sekolah dan dari siswa yaitu biaya pendapatan yang hilang karena siswa bersekolah. Siswa selama sekolah tidak bisa menggunakan waktunya untuk memperoleh pendapatan dan pekerjaan.

Biaya pendidikan termasuk biaya langsung (oleh sekolah, siswa dan atau keluarga siswa) dan biaya tidak langsung (seperti pendapatan yang hilang). Biaya langsung ini lebih mudah dihitung karena diketahui oleh para wajib pajak dan data di sekolahpun tersedia, sementara biaya tidak langsung sulit untuk dihitung. Kebanyakan biaya langsung berasal dari sistem persekolahan sendiri. Biaya langsung datang dari siswa atau keluarganya, seperti 1) biaya tambahan untuk ruangan, papan tulis, dan pakaian, 2) biaya transportasi/angkutan sekolah, 3) biaya lainnya seperti buku-buku, seni dan perlengkapan olah raga, dll. Hmsen (1963) telah membuat salah satu kajian yang komprehensif tentang ekonomi pendidikan. Dalam kajiannya dia telah mengumpulkan data balikan berbagai tingkat pendidikan, termasuk data kehidupan yang dikelompokkan menurut umur dan tahun pendidikan.

#### **4. Pengembangan Human Capital melalui Pendidikan:**

Respon terhadap Krisis Pendidikan dan Dunia Kerja

Philip H. Combs dalam *The World Educational Crisis: A System Analysis* (New York. Oxford University. 1968), mengungkapkan suatu sistem analisis terhadap krisis pendidikan dunia, dan secara implisit mengungkapkan pengembangan sistem- sistem pendidikan yang tidak hanya untuk merespon tuntutan-tuntutan sesuai dengan perkembangan atau kemajuan masyarakat tetapi juga tuntutan-tuntutan dunia kerja.

Menurut Combs, pada awal tahun 1950-an, sistem pendidikan di seluruh dunia mulai mengalami proses ekspansi, yang tidak ada mendahuluinya dalam sejarah umat manusia. Angka pendaftaran siswa mengalami peningkatan lebih dua kali lipat dari sebelumnya, pembiayaan (pendanaan) pendidikan bahkan meningkat lebih tajam dan pendidikan muncul menjadi industri lokal paling besar. Proses nyata itu menawarkan janji tentang kemajuan pendidikan yang berkelanjutan.

Bagaimana posisi persoalan pendidikan itu sekarang ini? Jawaban sepotong-sepotong berada pada fakta kering seperti keringnya bubuk mesiu. Meskipun terjadi ekspansi pendidikan besar-besaran, namun sejalan pertumbuhan populasi telah mengarah pada kenaikan jumlah orang dewasa yang tidak berpendidikan (buta huruf). UNESCO memberikan gambaran bahwa lebih dari 400 juta orang dewasa dari populasi negara- negara anggotanya, atau hampir 60% dari populasi aktif mereka tidak berpendidikan. Tetapi jawaban terbesar pada persoalan itu berada pada peringatan-peringatan para pemimpin yang cemas di hampir seluruh belahan dunia. Mereka memperingatkan bahwa kondisi krisis telah melanda sistem pendidikan di mana-mana dan telah mencengkeram banyak negara dalam genggamannya. Keadaan tersebut menggambarkan tantangan yang besar bagi pendidikan dan dunia kerja.

Memang benar bahwa suatu sistem pendidikan nasional kelihatannya selalu terkait dengan krisis kehidupan. Masing- masing secara periodik dikenal sebagai kurangnya dana, guru, ruang kelas, material (bahan) pengajaran, yakni kekurangan dalam segala hal kecuali peserta didik. Adalah benar juga bahwa sistem-sistem itu biasanya telah dimanajementi dalam menghadapi persoalan- persoalan kronik, dan yang lainnya telah

belajar hidup dengan persoalan itu. Meskipun demikian, kasus sekarang ini berbeda dengan apa yang telah biasa terjadi di masa lalu. Sekarang ini adalah krisis pendidikan dunia yang lebih samar dan jika dibandingkan dengan krisis makanan atau krisis militer tetapi bukan berarti dalam potensi membahayakan.

Karena kondisi lokal yang spesifik, krisis bervariasi dalam bentuk dan keburukan dari satu negara dengan negara lainnya. Tetapi penyebab internalnya yang sama: muncul dalam setiap negara, apakah institusional sudah stabil atau masih dalam perjuangan pembangunan dalam melawan perbedaan-perbedaan. Hakikat krisis itu ditunjukkan oleh kata-kata ‘perubahan’, ‘pengadaptasian’ dan ‘perbedaan’. Sejak 1945, semua negara secara fantastis mengalami perubahan lingkungan yang cepat; yang dibawa oleh sejumlah revolusi dunia yang meluas dan bersamaan, dalam ilmu dan teknologi, dalam ekonomi dan politik, dalam demografik dan struktur sosial. Sistem pendidikan juga telah tumbuh dan berubah secara cepat dari yang pernah ada sebelumnya. Tetapi semua hal itu diadaptasi terlalu terlambat dibandingkan dengan cepatnya kejadian-kejadian yang terus berubah. Konsekuensi perbedaan-perbedaan yang mengambil banyak bentuk antara sistem pendidikan dan lingkungan adalah esensi dari krisis pendidikan dunia yang meluas.

Ada empat penyebab perbedaan-perbedaan itu; yakni tajamnya kenaikan pada aspirasi kepopuleran pendidikan yang menimbulkan serbuan pada sekolah-sekolah dan universitas-universitas yang tersedia; kelangkaan sumber daya yang akut yang menyebabkan kendala sistem pendidikan dalam menanggapi penuh permintaan-permintaan baru; kelambanan inheren pada sistem pendidikan yang menyebabkannya berespon terlalu lambat dalam mengadaptasi kebutuhan-kebutuhan eksternal baru; dan kelambanan masyarakat itu sendiri terlampaui menekankan sikap tradisional, kebiasaan religius, pola-pola insentif dan prestise, dan struktur institusional yang telah menahan mereka dari pengoptimuman pemakaian pendidikan dan tenaga kerja berpendidikan untuk mempertahankan perkembangan nasional.

## **KESIMPULAN**

Agar krisis dapat dihadapi, penyesuaian dan pengadaptasian oleh keduanya (pendidikan dan masyarakat) harus dilakukan. Dalam menghadapi krisis, sistem pendidikan perlu dibantu dari setiap sektor kehidupan, dan juga dari sumber daya dari luar batas nasional, dan juga perlu uang lebih banyak. Selain itu, perlu diketahui pula bahwa sistem pendidikan dapat kehilangan daya dalam melihat dirinya sendiri. Pendidikan menempatkan posisinya dalam posisi yang mendua. Pendidikan menganjurkan setiap orang untuk mengubah caranya, tetapi juga kelihatannya pendidikan resisten terhadap inovasi terhadap dirinya sendiri. Keresistenan pendidikan terhadap perubahan bukan karena guru lebih konservatif dari siapapun, melainkan praktik-praktik tradisional cenderung mendorong masyarakat petani tradisional mensakralkan doktrin, dan dari satu generasi ke generasi berikutnya tetap merasa nyaman dengan keadaan itu.

Teknologi pendidikan membuat sedikit kemajuan yang melebihi tahap pekerjaan tangan, yakni dari aktivitas manusia langkah berarti telah dibuat dalam teknologi dan produktivitas banyak sektor, seperti dalam pembuatan obat, transportasi, pertambangan, komunikasi dan pabrik. Mendidik suatu negara, dan menjaga agar sistem pendidikan nasional tetap sesuai dengan zaman kelihatannya jauh lebih sulit daripada menempatkan manusia ke bulan.

Sesuai dengan pemahaman-pemahaman seperti diuraikan di atas, maka dalam analisis lebih jauh perlu dipertimbangkan faktor-faktor dasar tentang krisis pendidikan dunia ke dalam satu tempat untuk membuat tendensi-tendensi inheren tersebut menjadi eksplisit. Selanjutnya penting direkomendasikan beberapa elemen yang mungkin dalam membentuk strategi menghadapi krisis. Untuk memunculkan suatu metode analisis sistem pendidikan, diperlukan sebuah sistem dengan bagian-bagian yang saling berinteraksi dan menghasilkan indikator-indikatornya sendiri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anderson, L., & Windham, D. M. (Eds.). (1982). *Education and development: Issues in the analysis and planning of postcolonial societies*. Lexington Books.
- Batubara, C. (1991). *Manpower problems and policy in Indonesia*. Department of Manpower Republic of Indonesia.
- Beeby, C. E. (1979). *Pendidikan di Indonesia: Penilaian dan pedoman perencanaan*. LP3ES.
- Bird, R. M. (1996). *Tax policy and economic development*. The Johns Hopkins University Press.
- Bray, M., & Thomas, R. M. (1998). *Financing of education in Indonesia*. Asian Development Bank (ADB) & Comparative Education Research Centre (CERC), University of Hong Kong.
- Cohn, E. (1979). *The economics of education (Revised ed.)*. Ballinger Publishing Company.
- Combs, P. H. (1968). *The world educational crisis: A systems analysis*. Oxford University Press.
- Harrison, L. E., & Huntington, S. P. (Eds.). (2000). *Culture matters: How values shape human progress*. Basic Books.
- Jalal, F., & Supriadi, D. (Eds.). (2001). *Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah*. Bappenas–Depdiknas– Adicita Karya Nusa.
- Johns, R. L., Morphet, E. L., & Alexander, K. (1983). *The economics and financing of education*. Prentice-Hall.
- Leontief, W., et al. (2002). *The future of the world economy*. The World Bank.
- Marshall, C., Mitchell, D., & Wirt, F. (1989). *Culture and education policy in the American states*. Falmer Press.
- Supriadi, D. (2000). *Internasionalisasi pendidikan: Perbandingan mutu pendidikan antarnegara*. *Mimbar Pendidikan*, (4).
- The World Bank. (1996). *Priorities and strategies for education: A World Bank review*. The World Bank.
- Vaizey, J. (1962). *The economics of education*. Faber & Faber.